

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan hak dasar untuk semua individu dan menjadi fondasi penting bagi pembelajaran seumur hidup. Melalui ilmu pengetahuan, diharapkan setiap individu mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya sehingga dapat bersaing dalam masyarakat. Oleh karena itu, seluruh individu tanpa terkecuali, termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), harus memperoleh pendidikan yang layak. Selama ini, ABK cenderung diarahkan untuk mengikuti pendidikan yang sesuai dengan kondisi atau kelainannya di Sekolah Luar Biasa (SLB). Namun, pola ini secara tidak langsung menyebabkan diskriminasi terhadap ABK dan menghambat proses interaksi sosial antara mereka dengan anak-anak reguler. Akibatnya, ABK sering kali tersingkir dari kehidupan sosial di masyarakat luas.

Untuk mewujudkan interaksi yang adil serta pemenuhan hak belajar bagi semua anak, muncul konsep pendidikan inklusi. Menurut Rasmitadila (2020), pendidikan inklusi bertujuan merangkul keberagaman dan memberikan ruang bagi setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang setara. Sejalan dengan itu, Anjarsari (2018) menjelaskan bahwa pendidikan inklusi adalah bentuk layanan pendidikan yang menerima semua peserta didik dengan kebutuhan khusus di sekolah reguler yang berada di lingkungan tempat tinggal mereka, dengan dukungan layanan dan pendidikan yang disesuaikan. Pendidikan inklusi juga dimaknai sebagai proses, filosofi, dan praktik pendidikan yang menjamin hak belajar semua anak dalam satu lingkungan yang sama.

Namun dalam implementasinya, pendidikan inklusi masih sering dipahami secara sempit, yakni hanya sebatas menerima ABK di sekolah reguler sebagai bentuk pemenuhan hak pendidikan, tanpa benar-benar menyadari bahwa penerimaan tersebut harus diikuti oleh penyediaan layanan pendukung yang layak. Munajah et al. (2021) menyatakan bahwa pelaksanaan pendidikan inklusi di lapangan masih menghadapi tantangan, seperti sikap lingkungan yang belum sepenuhnya ramah terhadap siswa ABK. Meski terdapat upaya pelatihan guru kelas agar menjadi guru khusus dan diberikan kebebasan dalam mendesain pembelajaran yang inovatif, komitmen kelembagaan dari sekolah masih belum maksimal.

Angreni & Sari (2020) juga menyampaikan bahwa keberhasilan pendidikan inklusi sangat bergantung pada keterlibatan orang tua, penyediaan sarana prasarana, serta pengadaan guru pendamping khusus. Sayangnya, ketiga hal tersebut masih belum terlaksana dengan optimal. Padahal, sistem pendidikan inklusi bertujuan memberikan kesempatan kepada semua anak termasuk ABK dan anak-anak dengan bakat Istimewa untuk belajar dalam lingkungan yang sama dan memperoleh layanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Landasan hukum atas sistem ini juga telah ditegaskan dalam berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 5 ayat (1), yang menjamin hak semua warga negara untuk memperoleh pendidikan bermutu tanpa diskriminasi.

Menurut Saputra (2016), pembelajaran dalam pendidikan inklusi harus memperhatikan prinsip-prinsip yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik, khususnya mereka yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental,

maupun sosial. Implementasi kebijakan pendidikan inklusi secara lebih teknis juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa setiap ABK berhak memperoleh pendidikan di sekolah reguler. Namun, keberhasilan kebijakan ini bergantung pada berbagai faktor pendukung, seperti pelatihan guru, ketersediaan sarana prasarana, kerja sama berbagai pihak, serta dukungan sosial dari masyarakat, termasuk hubungan kolaboratif antara guru, orang tua, dan organisasi terkait (Amalia & Kurniawati, 2021).

Dukungan pemerintah dalam bentuk pelatihan guru dinilai sangat membantu dalam pelaksanaan pendidikan inklusi. Guru di sekolah inklusi dituntut untuk memahami kurikulum dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi ABK. Mereka juga harus memahami karakteristik masing-masing anak dan menyelaraskan materi pembelajaran agar sesuai dengan kemampuan peserta didik. Namun, Mustofa (dalam Udhiyanasari, 2019) menemukan bahwa masih ada guru yang bersikap kurang peduli terhadap keberadaan ABK, sehingga suasana kelas yang nyaman belum tercapai. Penelitian lain oleh Firli et al. (2020) juga menunjukkan bahwa banyak guru masih merasa bingung dalam menangani ABK, terutama dalam kegiatan belajar di kelas, dan belum mampu memberikan layanan yang tepat sesuai kebutuhan anak.

Selain itu, ketersediaan fasilitas khusus bagi siswa berkebutuhan khusus masih tergolong kurang. Fasilitas seperti alat bantu belajar, ruang terapi, dan sumber daya lainnya sangat penting agar siswa dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Di sisi lain, sekolah telah memberikan pelatihan kepada guru terkait pendidikan inklusi, yang merupakan langkah positif untuk

meningkatkan kompetensi guru dalam menghadapi keberagaman kebutuhan siswa. Pelatihan ini memungkinkan guru menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan siswa, sehingga pembelajaran lebih efektif dan menyeluruh.

Dukungan sekolah juga tampak melalui program layanan tambahan seperti bimbingan dan konseling, serta penggunaan materi ajar yang ramah inklusi. Hal ini tercermin dari pemanfaatan alat bantu visual, multimedia, dan metode pembelajaran interaktif yang membantu siswa memahami pelajaran dengan lebih baik.

Hasil observasi menunjukkan bahwa terdapat 43 Anak Berkebutuhan Khusus di SDN 131/IV Kota Jambi yang tersebar di berbagai kelas. Masing-masing kelas A, B, dan C di tiap tingkat memiliki jumlah ABK yang bervariasi. Di beberapa kelas, ABK didampingi oleh guru pendamping khusus, sementara di kelas lain, beberapa siswa telah mampu belajar secara mandiri atau didampingi langsung oleh orang tua.

Keterlibatan orang tua juga sangat positif. Mereka aktif dalam kegiatan sekolah dan menjalin komunikasi baik dengan guru, sehingga mendukung proses belajar anak di rumah maupun di sekolah. Secara umum, SDN 131/IV Kota Jambi telah menunjukkan langkah maju dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusi, meskipun masih terdapat tantangan, terutama terkait sarana dan prasarana.

Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti **IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSI DI SD NEGERI 131/IV KOTA JAMBI**. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan pembelajaran berbasis inklusi dan bagaimana kebijakan tersebut diterapkan di sekolah. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman

para guru dalam mengelola kelas inklusi secara lebih optimal dan menjadi referensi dalam pelaksanaan pembelajaran inklusif di tingkat sekolah dasar.

Rekomendasi perbaikan meliputi evaluasi sarana dan fasilitas, pendataan lebih akurat terhadap ABK, peningkatan pelatihan guru secara berkelanjutan, serta penguatan keterlibatan orang tua. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan SDN 131/IV dapat menjadi lingkungan belajar yang lebih inklusif dan mendukung seluruh potensi siswa, terutama mereka yang berkebutuhan khusus.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mempunyai pertanyaan yang dapat dijadikan sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Negeri 131/IV Kota Jambi
2. Apa saja tantangan dan hambatan dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Negeri 131/IV Kota Jambi Kota Jambi.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti tentunya mempunyai tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini. Adapun tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di SD Negeri 131/IV Kota Jambi
2. Untuk mengetahui hambatan dan tantangan dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di SD Negeri 131/IV Kota Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat dari penelitian ini yang pertama bagi peneliti, manfaat nya adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi banyak penulis, para akademis dan masyarakat mengenai bagaimana pendidikan implementasi bagi Anak Berkebutuhan Khusus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan referensi tambahan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi.

2. Manfaat Praktisi

- a. Bagi Peneliti, merupakan tugas akhir untuk menyelesaikan studi S1 Program Studi Administrasi Pendidikan dan juga dapat menambah ilmu bagi peneliti.
- b. Untuk Sekolah yang di teliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi kepada sekolah, untuk menjadi bahan kajian
- c. Sebagai acuan untuk peneliti selanjutnya, bagi yang ingin meneliti lebih lanjutb tentang Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi.